

# KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI POLISI PAMONG PRAJA



OLEH:  
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Samarinda, 30 Mei 2024

### BIODATA (CURRICULUM VITAE)



#### Pelatihan di Luar Negeri

1. Internal Auditor, di Auckland New Zealand
2. Risk Based Internal Audit, Queensland University Australia
3. Local Administration, Korea Selatan
4. Policy Making, Singapore
5. Regional Planning, London Inggris
6. Regional Urban Development, UC Irvine USA
7. Library Management, Belanda
8. Studi Strategis, Turki



#### Profil



Kepala BPSDM Kemendagri/Pembina Utama (IV/e)



Temanggung, 17 Oktober 1966



sugenghariyono230@gmail.com



0811812456



Jl. Taman Makam Pahlawan No. 8 kalibata Jakarta Selatan



#### Pengalaman Jabatan

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Kepala Biro Perencanaan, Hukum dan Kerjasama      | Th. 2010 - 2012 |
| 2. Kepala Pusat Litbang Kemendagri                   | Th. 2012 - 2015 |
| 3. Kepala Pusdatin Setjen Kemendagri                 | Th. 2016 - 2017 |
| 4. Inspektur Wil II Itjen Kemendagri                 | Th. 2017 - 2019 |
| 5. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Kemendagri | Th. 2019 - 2020 |
| 6. Sahli Mendagri Bidang Kemas dan Hal               | Th. 2020 - 2021 |
| 7. Plt. Dirjen Bina Bangda Kemendagri                | Th. 2021 - 2022 |
| 8. Kepala BPSDM Kemendagri                           | Th. 2022 - skr  |



#### Penghargaan

1. Piagam Cum Laude dari UGM
2. Piagam Lulusan Terbaik Diklatpim II LAN RI
3. Lulus dengan Pujian PPRA Lemhannas angkatan 50

# INDONESIA EMAS TAHUN 2045

Pencapaian impian dan visi Indonesia 2045 dibangun dengan 4 pilar berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar berbangsa, bernegara dan konstitusi. 4 Pilar Visi Indonesia 2045 yaitu:

1. Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
2. Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan
3. Pemerataan Pembangunan
4. Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola  
Kepemerintahan

## PROSPEK

 **DEMOGRAPHY**

**309** Juta jiwa  
**52%** Usia produktif  
**75%** Tinggal di kota  
**80%** Kelas menengah

 **EKONOMI**

- No. 4 PDB teratas di dunia
- Penghasilan per kapita US \$ 29.300
- Pergeseran menuju sektor yang lebih produktif
- Tumbuhnya sektor jasa

## PRASYARAT

 **KESIAPAN INFRASTRUKTUR**

 **KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA**

 **KESIAPAN TEKNOLOGI**

 **PERENCANAAN SPASIAL**

 **EKONOMI & FINANSIAL**  
**SUMBER DAYA (APBN Sehat)**  
**STABILITAS MAKRO**  
**STABILITAS POLITIK**  
**ATURAN HUKUM**

# 5 PRIORITAS KERJA PRESIDEN RI 2019-2024

1	<b>PEMBANGUNAN SDM</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ SDM yang pekerja keras, dinamis, terampil, dan menguasai IPTEK</li><li>▪ Mengundang talenta global</li></ul>
2	<b>PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Penghubung produksi dan distribusi</li><li>▪ Mempermudah akses wisata</li><li>▪ Mendongkrak lapangan kerja</li><li>▪ Nilai tambah perekonomian</li></ul>
3	<b>SIMPLIFIKASI REGULASI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Kendala regulasi disederhanakan, dipotong, dan dipangkas</li><li>▪ Omnibus Law</li></ul>
4	<b>PENYEDERHANAAN BIROKRASI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Penyederhanaan birokrasi menjadi 2 (dua) level eselon</li><li>▪ Peralihan jabatan struktural menjadi fungsional</li></ul>
5	<b>TRANSFORMASI EKONOMI</b>	Daya saing manufaktur dan jasa modern bernilai tambah tinggi





Visi-Misi dan arahan presiden yang terdiri dari **Pembangunan SDM, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi** diterjemahkan ke dalam 7 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024

## VISI-MISI PRESIDEN

- 1 Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
- 2 Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
- 3 Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
- 4 Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
- 5 Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
- 6 Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
- 7 Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
- 8 Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
- 9 Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

## ARAHAN PRESIDEN

- 1 Pembangunan SDM
- 2 Pembangunan Infrastruktur
- 3 Penyederhanaan Regulasi
- 4 Penyederhanaan Birokrasi
- 5 Transformasi Ekonomi

## 7 AGENDA PEMBANGUNAN

- 1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
- 2 Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
- 3 SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
- 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
- 5 Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- 6 Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
- 7 Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Sumber: Narasi RPJMN 2020-2024



# Arah Kebijakan dan Strategi ASN di Daerah

Pembangunan Kewilayahan Tahun 2020-2024

(Narasi RPJMN 2020-2024 Bab 3)

## Arah Kebijakan

Meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan dasar, daya saing, serta kemandirian daerah,

## Sasaran

Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi khusus (Provinsi Aceh, Papua, dan Papua Barat) melalui **peningkatkan kapasitas daerah otonom dan daerah khusus/daerah istimewa** untuk pemenuhan **standar pelayanan minimum, pengelolaan keuangan daerah dan pemenuhan pelayanan publik** yang lebih efektif dan efisien

## Strategi

Pelaksanaan **desentralisasi dan otonomi daerah** dengan **peningkatan kapasitas pemerintah daerah** melalui:  
e) **Peningkatan kapasitas aparaturnya daerah dalam manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah dan keahlian khusus lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah termasuk perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.**

## Polhukhankam (Narasi RPJMN 2020-2024 Bab 8)

1. Konsolidasi Demokrasi
2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
3. Penegakan Hukum Nasional Yang Mantap
4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

### Profesionalitas ASN

Penyederhanaan Eselonisasi dan Perluasan Jabatan Fungsional (dengan kompetensi spesifik)

Perbaiki sistem kesejahteraan ASN dan Pensiunan ASN

Perlunya Percepatan Penerbitan PP UU ASN

- Kompetensi dan Tingkat Pendidikan ASN rendah
- Tenaga Spesialis ASN masih kurang

Distribusi ASN dengan keahlian fungsional/tertentu belum mengacu pada sektor unggulan kewilayahan

### Kelembagaan

Tumpang tindih tugas dan fungsi antar lembaga karena belum adanya penataan tugas dan fungsi



# VUCA

Revolusi Industri 4.0 menyebabkan organisasi dan bisnis mengalami peningkatan *Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity* yang biasa dikenal dengan istilah 'VUCA'

## VOLATILITY

lingkungan bisnis yang labil, berubah amat cepat dan terjadi dalam skala besar

## UNCERTAINTY

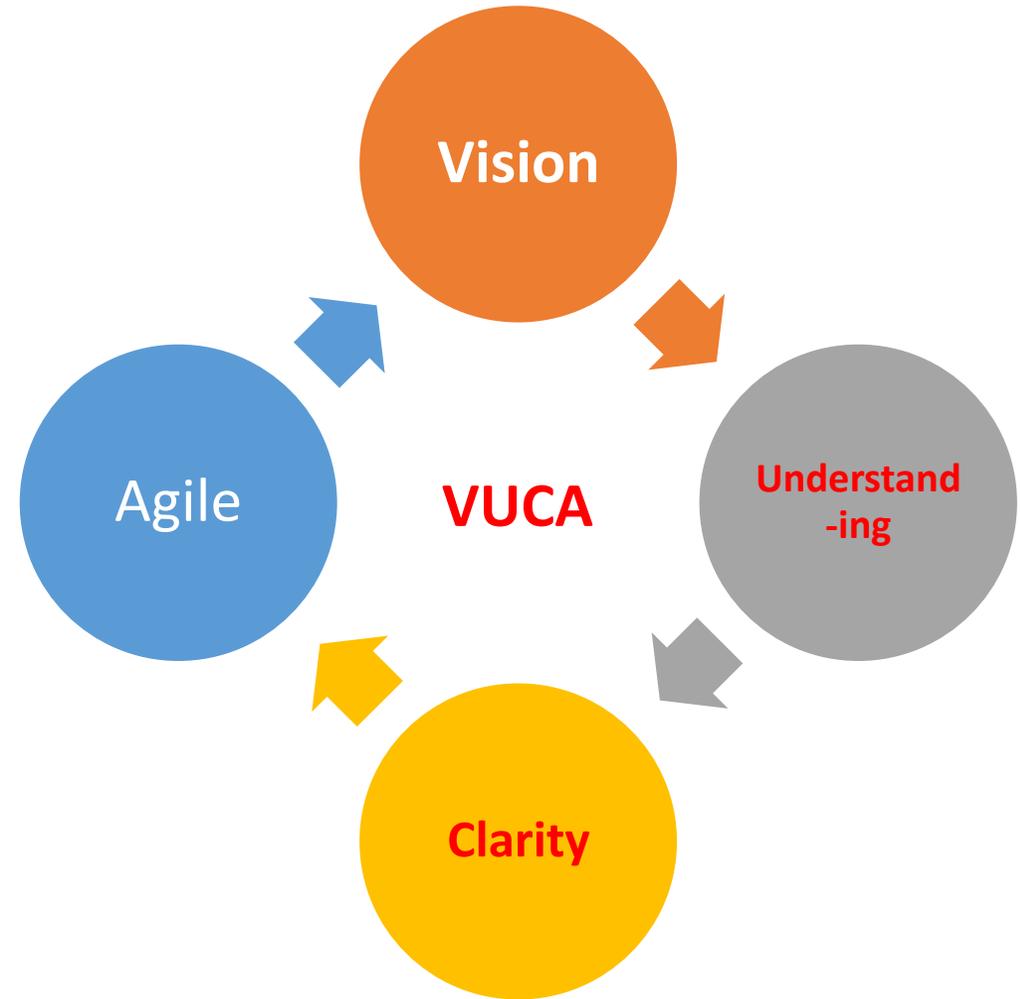
sulitnya memprediksi dengan akurat apa yang akan terjadi

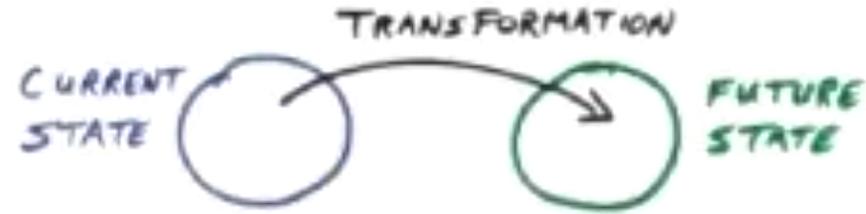
## COMPLEXITY

tantangan menjadi lebih rumit karena multi faktor yang saling terkait

## AMBIGUITY

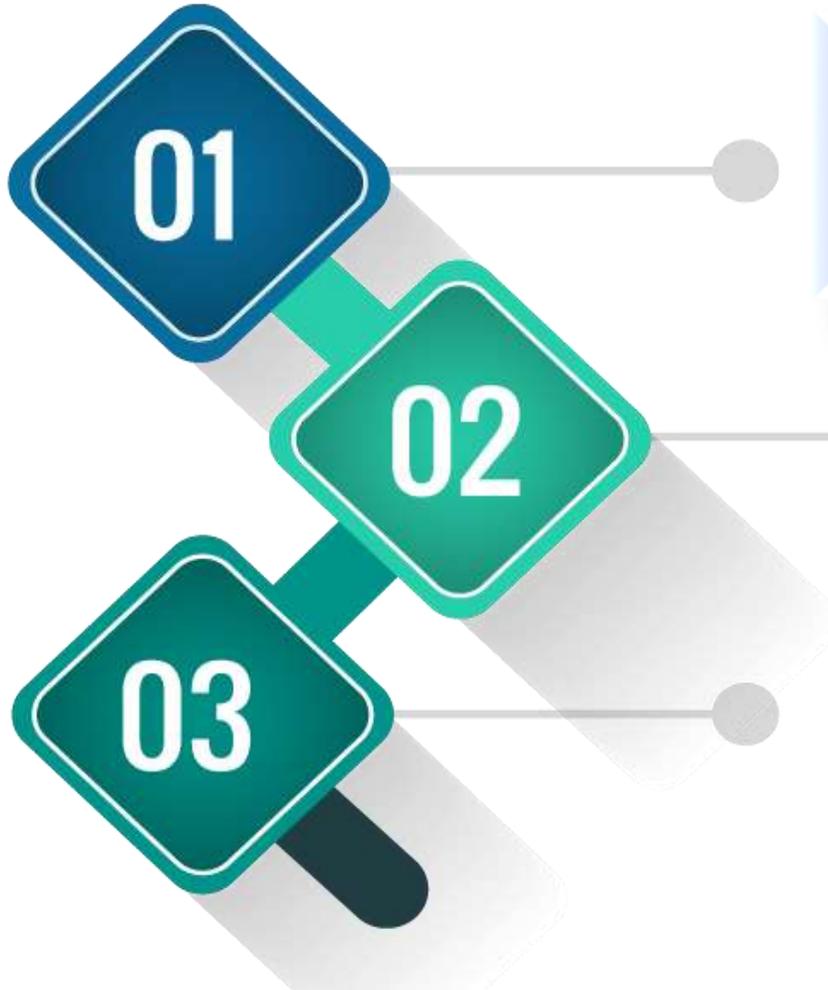
ketidakjelasan suatu kejadian dan mata rantai akibatnya







## KEDUDUKAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN OLEH DAERAH PROVINSI



Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah provinsi dilaksanakan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian secara nasional **dikoordinasikan** oleh Menteri Dalam Negeri (Psl 8 ayat 3 UU 23 Tahun 2014)

Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi, dilaksanakan oleh:

1. **Menteri Dalam Negeri, untuk pembinaan umum;** dan
2. **Menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, untuk pembinaan teknis**  
(Pasal 3 ayat 1 PP 12 Tahun 2017)

Pembinaan umum oleh Mendagri meliputi 10 aspek: pembagian urusan, pembangunan, keuangan, kepegawaian, kelembagaan, pelayanan publik, kerjasama daerah, kebijakan daerah, KDh dan DPRD, bentuk pembinaan lainnya, (Psl 3 PP 12 Tahun 2017)

**Setiap Tahun diterbitkan Permendagri ttg 1. RKPD, 2. Pedoman Umum Penyusunan APBD, 3. Kebijakan Pengawasan**



# TUGAS DAN FUNGSI BPSDM

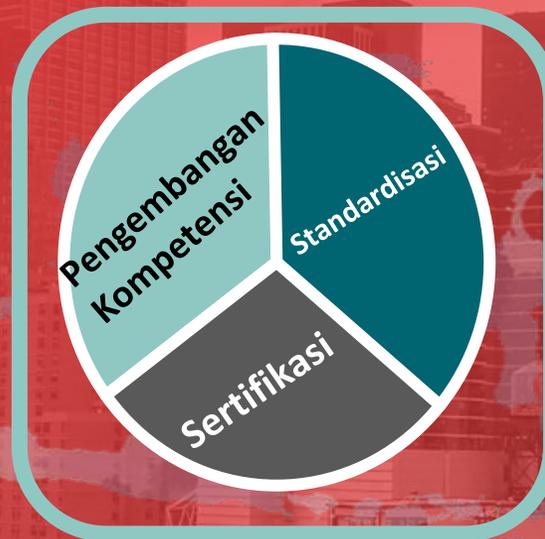
## TUGAS BPSDM

Melaksanakan pengembangan SDM Pemdagri sesuai dengan Ketentuan peraturan Per-UU an

## FUNGSI BPSDM

1. Penyusunan Kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan SDM Pemdagri
2. Pelaksanaan Pengembangan SDM Pemdagri
3. Pelaksanaan Penilaian kompetensi SDM Pemdagri
4. Pelaksanaan Pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan jabatan fungsional bidang Pemdagri
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan SDM bidang Pemdagri
6. Pelaksanaan administrasi BPSDM
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Menteri

## PENYELENGGARA PENGEMBANGAN SDM



Pusat



Kabupaten/Kota



Provinsi



## Arah Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri

### Rensta BPSDM Kemendagri 2020-2024

#### 1) Sasaran strategis :

Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri

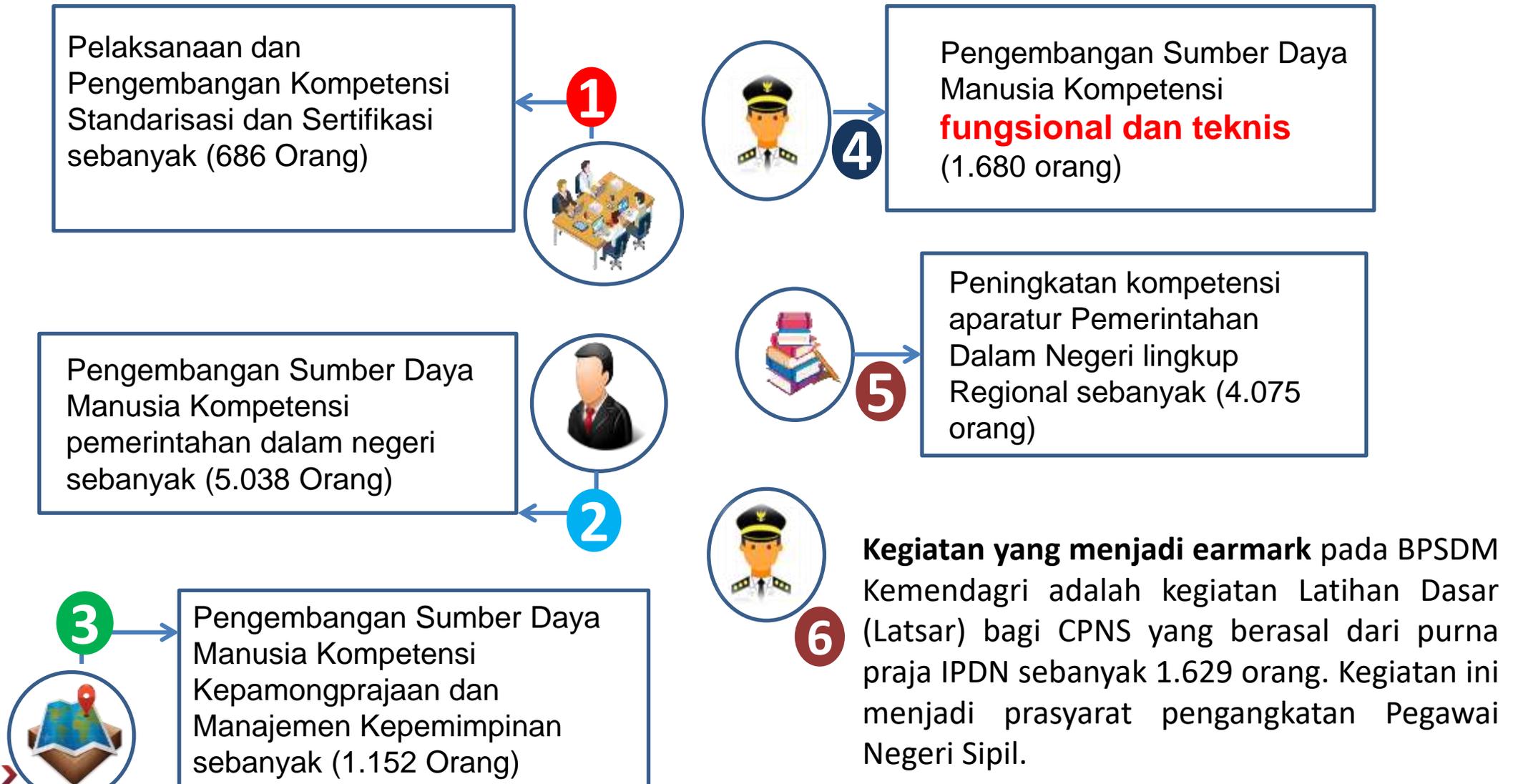
#### 2) Indikator Sasaran Strategis :

Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.

1. Mengembangkan program Kementerian Dalam Negeri Corporate University
2. Mengembangkan program standardisasi, sertifikasi, dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia aparatur pmdagri berbasis teknologi informasi
3. Menyelenggarakan standardisasi dan sertifikasi dalam rangka pengembangan sumber daya manusia aparatur yang kompeten dan professional
4. Menyelenggarakan pengembangan kompetensi sumber daya manusia aparatur pemerintahan dalam negeri
5. Menyelenggarakan pengembangan kompetensi kepamongprajaan dan manajemen kepemimpinan
6. Menyelenggarakan Kegiatan Pengembangan Kompetensi bagi pejabat Fungsional dan Teknis binaan Kementerian Dalam Negeri/Lembaga terkait
7. Menyelenggarakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional dalam peningkatan aparatur yang kompeten dan professional.



# PROGRAM PRIORITAS KEMENTERIAN/LEMBAGA BPSDM T.A 2024





# PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI POLISI PAMONG PRAJA



# URUSAN PEMERINTAHAN

- 1. PERTAHANAN
- 2. KEAMANAN
- 3. AGAMA
- 4. YUSTISI
- 5. POLITIK LUAR NEGERI
- 6. MONETER & FISKAL

**ABSOLUT**

**KONKUREN**

**PEM. UMUM**

**WAJIB (24)**

**PILIHAN (8)**

- 1. PENDIDIKAN
- 2. KESEHATAN
- 3. PU DAN PR
- 4. PERUMAHAN RAKYAT & KAW PERMUKIMAN
- 5. **TRAMTIBUM & LINMAS**
- 6. SOSIAL

**PELAYANAN DASAR (6)**

**NON PELAYANAN DASAR (18)**

**S P M**

**NSPK**

Memprioritaskan pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar

dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah, sumber daya personil, dan ketersediaan sarana dan prasarana.



# UU NO. 23 TAHUN 2014 TTG PEMERINTAHAN DAERAH

PASAL 12  
AYAT (1)  
Huruf e

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB  
YG BERKAITAN DENGAN  
PELAYANAN DASAR MELIPUTI  
KETENTERAMAN, KETERTIBAN  
UMUM, & PERLINDUNGAN  
MASYARAKAT

PASAL 65  
AYAT (1)  
Huruf b

KEPALA DAERAH MEMPUNYAI  
TUGAS MEMELIHARA  
KETENTERAMAN &  
KETERTIBAN MASYARAKAT

PASAL 255  
AYAT (1)

DIBENTUK SATPOL PP UTK  
MENEGAKKAN PERDA &  
PERKADA,  
MENYELENGGARAKAN  
KETERTIBAN UMUM &  
KETENTERAMAN, SERTA  
MENYELENGGARAKAN  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

SATPOL PP MERUPAKAN APARAT PEMERINTAH DAERAH YG MENJALANKAN FUNGSI  
MENEGAKKAN PERDA DAN PERKADA, MENYELENGGARAKAN KETERTIBAN UMUM &  
KETENTERAMAN, SERTA MENYELENGGARAKAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

MELALUI PENEGAKKAN PERDA DAN PERKADA, MENYELENGGARAKAN KETERTIBAN UMUM DAN  
KETENTERAMAN, SERTA MENYELENGGARAKAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT, SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA KONSISTEN MENJAGA CITRA DAN WIBAWA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DAERAH



# UU 23 2014



## Pasal 18

- 1) Penyelenggaraan pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar:

## Pasal 298

- 1) Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal



## SATPOL PP MERUPAKAN APARAT PEMDA



**MENJALANKAN FUNGSI MENEGAKKAN  
PERDA/ PERKADA, MENYELENGGARAKAN  
TIBUMTRAS DAN LINMAS**



**Kualitas Personil  
SDM Pol PP**

**UU Nomor 23  
Tahun 2014**

**Pasal 256**

Polisi pamong praja adalah jabatan fungsional pegawai negeri sipil yang penetapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Polisi pamong praja diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

Polisi pamong praja harus mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional.

Polisi pamong praja yang memenuhi persyaratan dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



# SATPOL PP

(PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP)

## TUGAS

- menegakkan Perda dan Perkada;
- menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan
- menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

## FUNGSI

- Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan Trantibumlinmas;
- Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan Trantibumlinmas;
- Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan Trantibumlinmas dengan instansi terkait;
- Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada;
- Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan PerUU.

## KEWENANGAN

- Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

# JENIS DIKLAT POL

PERMENDAGRI  
No.71 TAHUN 2020

DIKLAT DASAR

DIKLAT TEKNIS

DIKLAT  
FUNGSIONAL



## JENIS DIKLAT DASAR

PERMENDAGRI  
No.71 TAHUN 2020

DIKLAT DASAR  
POLISI  
PAMONG  
PRAJA  
KELOMPOK JPT  
DAN JABATAN  
ADMINISTRASI

JPT PRATAMA (30  
JP)

ADMINISTRATOR (50 JP);

PENGAWAS DAN  
PELAKSANA (60 JP).

DIKLAT DASAR  
POLISI PAMONG  
PRAJA BAGI PNS  
YANG DIANGKAT  
DALAM FORMASI  
JABATAN  
FUNGSIONAL

KATEGORI KEAHLIAN  
DAN KETERAMPILAN  
(100 JP).

DIKLAT DASAR POLISI  
PAMONG PRAJA BAGI PNS  
YANG ALIH  
JABATAN/PERPINDAHAN  
DAN YANG  
DISESUAIKAN/INPASSING  
KE JABATAN FUNGSIONAL

KATEGORI KEAHLIAN  
DAN KETERAMPILAN  
(60 JP)



## **JENIS DIKLAT FUNGSIONAL**

PERMENDAGRI  
No.71 TAHUN 2020

**1. DIKLAT FUNGSIONAL JENJANG MADYA (120 JP)**

**2. DIKLAT FUNGSIONAL JENJANG MUDA (120 JP)**

**3. DIKLAT FUNGSIONAL BAGI POL PP YANG AKAN NAIK  
DARI KATEGORI KETERAMPILAN MENJADI KATEGORI  
KEAHLIAN (120 JP)**

**4. DIKLAT FUNGSIONAL BAGI JAFUNG POL PP DALAM  
KATEGORI KETERAMPILAN (100 JP).**



**BEBERAPA  
MACAM  
DIKLAT  
TEKNIS**

1. Diklat Mediasi dan Negosiasi;

2. Diklat Pengendalian Massa;

3. Diklat Pertolongan Pertama Gawat Darurat  
(Bencana);

4. Training of Trainer/Diklat Instruktur;

5. Diklat Publik Relation;

6. Diklat Perencanaan dan Penganggaran Urusan  
Trantibumlinmas.;

7. Diklat Inteligen/Deteksi dan Cegah Dini.



# PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI POL PP TAHUN 2024

No	Nama Kegiatan
1	Diklat Dasar bagi Jafung Pol PP dari jalur Formasi;
2	Diklat Dasar bagi JPT, Administrator, Pengawas & Pelaksana;
3	Diklat Fungsional Jenjang Madya;
4	Diklat Fungsional Jenjang Muda;
5	Diklat Fungsional Jenjang Keterampilan;
6	Diklat Fungsional Alih Kategori;
7	Diklat Teknis untuk mendukung Pilkada Serentak;
8	Diklat Teknis Mediasi dan Negosiasi;
9	Diklat Teknis Inteligen/Deteksi dan Cegah Dini; dan
10	Diklat Teknis bagi PPNS Penegak Perda.

